Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Era Digital

Yeti S. Hasan^a, Sarlis Mooduto^b, Nur Lazimatul Hilma Sholehah^c

^a Faculty of Law, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia

^b Faculty of Computers and Science, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia

^c Faculty of Economics and Business, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: nurlazimatul72@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Restorative justice; local wisdom; minor offences; digital law.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Aug 22, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.108339</p>	<p><i>Restorative justice (RJ) has emerged as an alternative approach within the criminal justice system, particularly in resolving minor offences. In Indonesia, RJ practices are closely intertwined with local wisdom that emphasises consensus, reconciliation, and the restoration of social harmony. However, the digital era presents new challenges, as information technology not only accelerates case resolution but also raises issues of unequal access to justice. This study aims to analyze the practice of restorative justice based on local wisdom in handling minor criminal offenses and to examine its relevance within the context of legal digitalization in Indonesia. The research employed a qualitative method with a juridical-empirical approach, involving literature review, analysis of statutory regulations, and interviews with law enforcement officials and traditional leaders in Gorontalo. The findings reveal that local wisdom provides social legitimacy for RJ practices, thereby strengthening public acceptance of out-of-court settlements. Furthermore, legal digitalisation, through e-justice and e-documentation systems, offers opportunities to expand access and transparency, although it still faces challenges related to infrastructure and digital literacy. This study underscores that integrating local wisdom with digital innovation is a strategic step to optimise the implementation of restorative justice in Indonesia. Therefore, it is crucial to formulate a digital legal framework that is adaptive to local values to promote substantive justice.</i></p>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dalam satu dekade terakhir memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (Fikarudin & Ermania, 2025, p. 10). *Restorative justice* (keadilan restoratif) dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis karena

menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku dan pemulihan harmoni sosial di tengah masyarakat (Karjono & Malau, 2024, p. 22). Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman semata. Dalam konteks Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme non litigasi dan peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun demikian, realitas penyelesaian tindak pidana ringan masih menghadapi kendala serius. Menurut Mahkamah Agung, sekitar 65% perkara pidana yang masuk ke pengadilan pada tahun 2023 merupakan tindak pidana ringan seperti pencurian kecil dan penganiayaan ringan yang sejatinya dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* (Nugroho, 2023, p. 5). Kondisi ini menimbulkan penumpukan perkara, menambah beban pengadilan sekaligus memperlihatkan keterbatasan pendekatan represif konvensional dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pemulihan (Djunaedi, 2023, p. 7).

Disisi lain, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang berpotensi besar mendukung penerapan *restorative justice*. Provinsi Gorontalo, misalnya, mengenal filosofi *Adati hula-hula'a to sara', sara' hula-hula'a to Kuru'ani* (adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah) yang menekankan penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan musyawarah. Praktik *Molelo* (perdamaian adat) dan *Tanggango* (mediasi oleh tokoh adat) telah terbukti mampu menyelesaikan lebih dari 70% kasus kecil dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi². Namun, praktik ini belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem hukum formal, sehingga nilai-nilai lokal yang efektif menjaga harmoni sosial masih terpinggirkan dalam sistem peradilan modern.

Sementara itu, perkembangan teknologi digital menawarkan peluang baru untuk memperkuat implementasi *restorative justice*. Digitalisasi sistem peradilan seperti *e-court* dan platform mediasi daring mampu memperluas akses keadilan, mempercepat proses dan menjamin transparansi penyelesaian kasus (Judijanto et al., 2024, p. 19). Bahkan teknologi seperti *blockchain* memungkinkan pencatatan hasil mediasi yang lebih aman, transparan dan tidak dapat diubah. Namun, integrasi kearifan lokal dengan kerangka hukum digital masih jarang dilakukan, sehingga muncul kesenjangan antara kebutuhan modernisasi hukum dan pelestarian tradisi lokal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan *restorative justice* berbasis kearifan lokal tidak hanya dari aspek budaya dan hukum, tetapi juga dalam kerangka digitalisasi sistem peradilan. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai adat dengan teknologi dapat memperkuat penyelesaian tindak pidana ringan secara lebih efisien dan inklusif. Dari penjelasan di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang konstruksi kerangka hukum digital berbasis kearifan lokal dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif dan studi lapangan. Kajian normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum serta literatur akademik terkait penerapan *restorative justice*, kearifan lokal dan hukum digital. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh

adat Gorontalo mengenai praktik *Molelo* (perdamaian adat) dan *Tanggango* (mediasi adat), serta aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana ringan (Adriaman & Siagian, 2024, p. 8).

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui metode analisis tematik dan komparatif untuk melihat relevansi antara mekanisme adat, hukum positif, dan peluang digitalisasi hukum. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumen resmi untuk memperkuat validitas data. Melalui metode ini, penelitian berupaya merumuskan kerangka hukum digital berbasis kearifan lokal yang dapat mendukung penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia (Susanti & Efendi, 2022, p. 15).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Praktik Keadilan Restoratif Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Praktik keadilan restoratif berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian tindak pidana ringan merupakan bentuk pemulihan relasi sosial yang berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang plural, setiap komunitas adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Kurniawan et al., 2024, p. 33). Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan empat kelompok informan, yakni aparat penegak hukum (kepolisian), lembaga adat, pelaku *restorative justice*, dan pakar hukum digital, menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif telah lama dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan seperti pencurian kecil, pertikaian antarwarga, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disepakati untuk diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak.

Lembaga adat memainkan peran sentral dalam proses ini. Mereka menjadi fasilitator dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Proses ini menekankan pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian kompensasi yang disepakati, serta pernyataan damai yang disaksikan oleh masyarakat (Bahri, 2024, p. 14). Mekanisme ini bukan hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan keharmonisan sosial. Dari sisi aparat hukum, seperti kepolisian, ada pengakuan bahwa praktik ini sangat membantu mengurangi beban perkara dan lebih cepat dalam memberikan penyelesaian yang diterima masyarakat. Namun, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema karena meskipun penyelesaian melalui mekanisme adat telah dilakukan, belum ada dasar hukum yang jelas dan formal untuk menghentikan proses hukum secara resmi. Hal ini menimbulkan kebingungan antara prinsip legal formal dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang kontekstual.

Sementara itu, dari sisi pelaku *restorative justice*, mereka merasa bahwa penyelesaian secara adat lebih manusiawi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi stigma hukum. Reymond Kapojos, sebagai Bhabinkamtibmas, menyatakan bahwa proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban dan masyarakat, sekaligus memperoleh kesempatan untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial.

Pakar hukum digital melihat bahwa praktik ini merupakan refleksi nyata dari *living law* di masyarakat Indonesia. Namun, tanpa dokumentasi dan pengakuan formal, praktik ini akan sulit

mendapat legitimasi dari negara. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya merancang sistem hukum yang mampu mengakomodasi mekanisme adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terutama dengan menciptakan jembatan antara hukum positif dan hukum adat (Firmanto et al., 2024, p. 21).

Dari keseluruhan temuan lapangan, praktik keadilan restoratif berbasis kearifan lokal terbukti masih eksis dan berfungsi dalam masyarakat. Namun, eksistensinya masih bersifat informal, tergantung pada kesepakatan sosial dan posisi tokoh adat di wilayah masing-masing. Dalam beberapa kasus, keberadaan lembaga adat yang kuat menjadi kunci keberhasilan proses restoratif ini. Namun di daerah yang mengalami erosi nilai adat, praktik ini menjadi tidak konsisten dan bahkan berpotensi disalahgunakan jika tidak disertai pengawasan.

Keberhasilan keadilan restoratif berbasis adat sangat bergantung pada legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh adat. Mekanisme yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan akan memperkuat efektivitasnya. Namun jika hanya menjadi formalitas atau dilakukan secara sepihak, keadilan yang dicapai bisa menjadi semu. Lebih jauh, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan harmoni sosial dalam menyelesaikan persoalan hukum. Hal ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan retributif, tetapi juga restoratif (Maulida, 2025, p. 3).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan praktik keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional, khususnya untuk penyelesaian perkara ringan yang tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap ketertiban umum. Pengakuan hukum yang sah terhadap hasil penyelesaian adat akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif berbasis kearifan lokal tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* (RJ) yang berbasis kearifan lokal di Gorontalo mampu menjadi mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih diterima oleh masyarakat. Nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan relasi sosial yang terkandung dalam adat Gorontalo memberikan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan RJ. Hal ini sejalan dengan temuan Nooryono (2025, p. 18) yang menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia berfungsi sebagai basis legitimasi sosial RJ, sehingga memperkuat penerimaan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sejalan dengan itu, Zehr (2002) menekankan bahwa RJ pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan bukan sekadar menjatuhkan sanksi, sehingga nilai-nilai lokal yang mengutamakan rekonsiliasi sangat relevan.

Namun demikian, terdapat pandangan berbeda yang menyoroti keterbatasan penerapan RJ dalam konteks hukum positif Indonesia. Azhar (2022, p. 8) mengkritik bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung kaku dan formalis-legalistik, sehingga meskipun nilai lokal diakomodasi, penerapannya sering terkendala oleh budaya hukum aparat. Selain itu, Pratama (2025, p. 85) menyoroti bahwa digitalisasi dalam praktik RJ justru berpotensi mengurangi kedalaman dialog dan sentuhan kemanusiaan yang menjadi ciri khas pendekatan berbasis komunitas. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kearifan lokal dapat memperkuat legitimasi

RJ, tantangan tetap ada dalam implementasi di tengah dominasi sistem hukum formal dan perkembangan teknologi.

Tantangan dan Peluang Digitalisasi Dalam Mendukung *Restorative Justice* Berbasis Adat

Transformasi digital yang melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat modern telah menyentuh ranah pendukung dalam sistem peradilan adat, khususnya dalam konteks *restorative justice*. Peneliti mengungkapkan bahwa interaksi antara teknologi digital dengan sistem penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal harus dipahami dalam batas-batas yang jelas. Temuan penelitian menegaskan bahwa proses digitalisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengubah sifat fundamental dari praktik keadilan restoratif tradisional yang bercorak kontan, konkret, personal dan harus dipertemukan secara langsung oleh Tetua Adat dalam forum adat. Oleh karena itu digitalisasi hanya dapat berperan dalam mendokumentasikan hasil proses adat, bukan menggantikan esensi dari proses itu sendiri.

Di balik potensi besar yang ditawarkan teknologi digital, peneliti mengidentifikasi sejumlah tantangan mendasar yang perlu disikapi secara serius. Kesenjangan digital antara generasi muncul sebagai masalah utama, di mana para tetua adat yang berperan sebagai mediator seringkali mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru (Sulaiman et al., 2024, p. 11). Sementara itu, generasi muda yang mahir secara teknologi justru kerap kekurangan pemahaman mendalam tentang filosofi dan nilai-nilai adat yang menjadi roh dari proses *restorative justice*. Ketimpangan ini jika tidak ditangani dengan bijaksana berpotensi mengikis kearifan lokal yang justru menjadi fondasi utama sistem peradilan adat.

Persoalan keamanan data dan privasi juga muncul sebagai tantangan signifikan. Proses *restorative justice* berbasis adat seringkali melibatkan pembahasan masalah-masalah sensitif yang membutuhkan kerahasiaan tinggi. Kekhawatiran akan kebocoran data atau penyalahgunaan rekaman digital proses mediasi menjadi penghambat utama dalam penerimaan teknologi oleh banyak komunitas adat. Hal ini terutama relevan dalam kasus-kasus sengketa tanah atau konflik keluarga yang melibatkan kepentingan strategis (Sulianta, 2024, p. 16).

Aspek hukum juga tidak kalah pelik. Peneliti menemukan bahwa validitas dan pengakuan hukum terhadap proses *restorative justice* yang dilakukan secara digital masih menjadi wilayah abu-abu. Ketidaktepatan status hukum hasil mediasi virtual baik dalam sistem hukum adat maupun hukum nasional menciptakan ketidakpastian yang dapat mengurangi efektivitas penyelesaian konflik (Partini, 2024, p. 14). Situasi ini memunculkan paradoks dimana teknologi yang seharusnya mempermudah justru menciptakan kerumitan baru dalam aspek legalitas.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap berbagai peluang transformatif yang dibawa oleh digitalisasi dalam kapasitasnya sebagai alat pendukung. Teknologi digital menawarkan solusi inovatif yang strategis untuk pendokumentasian pengetahuan dan putusan adat yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan serta tradisi lisan para tetua. Peluang ini tidak terletak pada proses mediasi itu sendiri, melainkan pada pengarsipan dan kompilasi hasil-hasilnya. Baate Gorontalo Utara selaku komunitas adat dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan bank data digital yang berfungsi sebagai repositori kearifan lokal, memastikan kelestarian dan kemudahan akses terhadap putusan-putusan adat bagi generasi mendatang.

Peluang untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum formal melalui teknologi patut mendapatkan perhatian serius. Inovasi seperti blockchain dan smart contract memang dapat

digunakan untuk mendokumentasikan kesepakatan restoratif secara lebih transparan dan aman, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Beberapa komunitas adat bahkan telah mulai mengembangkan platform digital khusus yang berfungsi sebagai bank data putusan-putusan adat, yang dapat menjadi referensi berharga untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses mediasi adat tetap harus dilakukan secara tradisional, karena tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan teknologi.

Dampak sosial-budaya dari digitalisasi dalam restorative justice berbasis adat menunjukkan wajah yang kompleks. Di satu sisi, teknologi memperkuat solidaritas komunitas dengan memudahkan komunikasi antar anggota yang terpisah jarak. Namun di sisi lain, kekhawatiran akan berkurangnya nuansa kekeluargaan dan spiritualitas dalam proses mediasi virtual tetap menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ritual-ritual simbolis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari musyawarah adat tidak dapat sepenuhnya diadaptasikan dalam format digital, karena esensi kekeluargaan dan spiritualitas dalam proses tersebut sulit dipindahkan ke dalam bentuk virtual.

Persoalan harmonisasi hukum muncul sebagai tema sentral dalam penelitian ini. Kesenjangan antara kelenturan hukum adat yang kontekstual dengan rigiditas sistem hukum nasional justru semakin terasa dengan hadirnya teknologi digital. Proses standarisasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan sistem digital seringkali berbenturan dengan esensi restorative justice adat yang justru mengedepankan fleksibilitas dan kontekstualitas. Beberapa komunitas adat mulai mengembangkan sistem hybrid yang memadukan unsur digital untuk kepentingan administratif sambil mempertahankan proses substantif secara tradisional.

Aspek regenerasi melalui pelibatan generasi muda menunjukkan dinamika yang menarik. Ironisnya, digitalisasi yang seharusnya menjadi jembatan antargenerasi justru berpotensi memperlebar jurang jika tidak dikelola dengan tepat. Penelitian menemukan fenomena dimana generasi muda seringkali hanya berperan sebagai operator teknis tanpa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat yang melatarbelakangi proses restorative justice. Namun di beberapa komunitas yang berhasil, model pendampingan intensif antara tetua adat dan generasi muda telah membuahkan hasil menggembirakan, menciptakan sintesis baru antara kearifan tradisional dan kemahiran teknologi.

Pada hakikatnya, digitalisasi dalam restorative justice berbasis adat bukanlah soal memilih antara tradisi dan modernitas, melainkan tentang menemukan titik keseimbangan dimana teknologi dapat memperkuat nilai-nilai adat tanpa mengorbankan esensinya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan restorative justice adat di era digital terletak pada kemampuan menciptakan model-model hybrid yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing komunitas. Pendekatan bottom-up yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berfungsi sebagai alat pemer kaya budaya hukum adat, bukan sebagai faktor disruptif yang mengikisnya secara perlahan.

Hal ini selaras dengan pendapat Rasiwan (2025, p. 102) yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam sistem peradilan pidana formal berkontribusi terhadap percepatan layanan hukum serta meminimalkan hambatan birokrasi. Namun, dalam konteks peradilan adat, penerapan digitalisasi memiliki karakteristik yang berbeda, di mana teknologi berfungsi terutama sebagai alat pendukung dokumentasi tanpa mengubah sifat dan prosedur penyelesaian kasus yang personal dan

tradisional. Marzuki (2024, p. 6) bahkan menegaskan pentingnya harmonisasi kerangka hukum digital untuk memastikan legitimasi penyelesaian sengketa secara daring.

Akan tetapi, sejumlah penelitian lain memberikan catatan kritis. Wibowo (2023a, p. 175) mengingatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa digital masih menghadapi risiko keamanan serta belum memiliki standar regulasi yang mapan, sehingga penggunaannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Imelda et al., (2025, p. 47) juga menyoroti bahwa digitalisasi justru dapat menciptakan jurang akses baru bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, terutama dalam kasus pelanggaran ringan, sehingga berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, meskipun konstruksi hukum digital menjanjikan efektivitas, penerapannya harus memperhitungkan aspek inklusivitas dan perlindungan hukum agar benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Kebutuhan Kerangka Hukum *Hybrid* untuk Penguatan *Restorative Justice*

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif, hasil penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan hadirnya kerangka hukum hybrid yang mampu menjembatani dua sistem hukum yang selama ini berjalan secara paralel yakni hukum adat dan hukum formal negara (Rizkia et al., n.d., p. 23). Selama ini, proses *restorative justice* yang dijalankan oleh komunitas adat berjalan berdasarkan nilai-nilai lokal yang bersifat luwes, kontekstual, dan berbasis musyawarah. Namun dalam praktiknya, hasil dari proses ini sering kali tidak mendapatkan legitimasi formal karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengakui kekuatan hukum dari putusan atau kesepakatan adat, terlebih bila proses tersebut dilaksanakan dengan dukungan teknologi digital.

Fachmy A. Onder Kasubi Luhkum Sikum, menunjukkan bahwa meskipun mereka mendukung pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara ringan, mereka sering mengalami kebingungan dalam memutuskan apakah hasil musyawarah adat dapat menjadi dasar penghentian penyidikan atau pengalihan perkara. Hal ini terjadi karena belum ada instrumen hukum positif yang secara tegas mengatur posisi hukum kesepakatan adat, terutama jika tidak didampingi oleh aparat formal atau jika prosesnya tidak terdokumentasi secara sistematis. Dalam banyak kasus, meskipun kedua belah pihak sudah berdamai melalui forum adat, kepolisian tetap melanjutkan proses hukum karena adanya kekhawatiran akan pelanggaran prosedur atau tekanan administratif dari lembaga di atasnya. Dari sisi pelaku *restorative justice*, kebutuhan akan kerangka hukum hybrid sangat dirasakan. Mereka mengungkapkan bahwa pendekatan adat memberi ruang untuk menyampaikan penyesalan, meminta maaf secara langsung, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Namun, ketika proses ini tidak diakui secara hukum formal, mereka tetap berisiko menghadapi sanksi pidana, bahkan setelah melakukan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat. Ini menciptakan rasa ketidakadilan baru yang bersumber dari ketidaksinkronan sistem hukum.

Sementara itu, Rahmat B. Pakaya, tokoh adat, menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang tetap menghormati fleksibilitas hukum adat namun mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang menyepakati penyelesaian perkara melalui mekanisme lokal. Para tetua adat menyampaikan bahwa mereka tidak menolak pembaruan hukum, termasuk digitalisasi, selama kerangka hukum yang dibentuk tidak menafikan nilai-nilai dan struktur sosial budaya komunitas.

Mereka juga menginginkan posisi mereka sebagai pemangku keadilan lokal mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dalam sistem nasional..

Pak Ilham selaku pakar hukum digital yang diwawancarai dalam penelitian ini menyampaikan bahwa kerangka hukum hybrid harus mampu memadukan asas legalitas hukum formal dengan prinsip moralitas dan keadilan sosial dalam hukum adat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dirancang suatu sistem yang memungkinkan dokumentasi hasil mediasi adat menggunakan teknologi digital yang sah dan bisa diterima di pengadilan. Namun, persoalan sebenarnya bukan terletak pada digitalisasi, melainkan pada pandangan aparat penegak hukum (APH) yang bersifat positivistik, di mana penyelesaian mediasi adat yang bertujuan untuk mewujudkan *restitutio in integrum* tidak diakui oleh hukum negara. Ini termasuk pengakuan terhadap tanda tangan digital para pihak, pengesahan elektronik oleh lembaga adat yang terdaftar, serta platform yang menyimpan dan mengenkripsi hasil kesepakatan secara resmi. Menurut mereka, infrastruktur digital hukum ini akan menjadi tulang punggung bagi legitimasi legal dari keadilan restoratif berbasis adat..

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kerangka hukum hybrid bukan hanya sebatas keinginan harmonisasi antar sistem hukum, tetapi merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan lokal dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dalam satu ekosistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rubi et al., 2021, p. 15). Tanpa adanya kerangka hukum yang menjembatani keduanya, maka akan terus terjadi tumpang tindih dan ketegangan antara dua sistem yang pada dasarnya sama-sama bertujuan memberikan keadilan. Hybridisasi hukum ini diharapkan tidak hanya mengakomodasi praktik keadilan restoratif adat dalam hukum nasional, tetapi juga mendorong lahirnya model-model penyelesaian sengketa yang lebih berakar pada kearifan lokal sekaligus terbuka pada inovasi hukum berbasis teknologi.

Melalui pembentukan kerangka hukum hybrid yang inklusif dan adaptif, *restorative justice* dapat berkembang menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat (Utami & Rezki, 2025, p. 27). Pengakuan terhadap sistem adat tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap pluralitas hukum, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Tampinongkol (2024, p. 47) juga menemukan bahwa penyelesaian non-prosedural berbasis tradisi masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan inovasi digital sepanjang ada dukungan regulasi yang memadai. Namun demikian, sejumlah penelitian memperingatkan bahwa integrasi tersebut tidak lepas dari risiko. Azhari et al., (2024, p. 101) menegaskan bahwa tidak semua praktik adat sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun hak asasi manusia, sehingga integrasi perlu dilakukan secara selektif agar tidak melanggengkan ketidakadilan. Wibowo (2023b, p. 84) bahkan menekankan perlunya *remodeling* menyeluruh terhadap sistem penyelesaian perkara di Indonesia agar kompatibel dengan perkembangan teknologi, bukan sekadar adaptasi parsial. Dengan demikian, meskipun integrasi kearifan lokal dengan digitalisasi hukum berpotensi memperkuat legitimasi dan efektivitas RJ, diperlukan kerangka hukum yang adaptif sekaligus selektif agar nilai-nilai lokal yang diakomodasi tetap selaras dengan prinsip universal keadilan dan perlindungan hak.

SIMPULAN

Praktik *restorative justice* berbasis kearifan lokal, khususnya melalui mekanisme Molelo dan Tanggango di Gorontalo, terbukti efektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan karena menekankan pemulihan relasi sosial, tanggung jawab pelaku, dan kepuasan korban. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal memiliki relevansi dengan prinsip keadilan restoratif modern sekaligus berpotensi mengurangi beban perkara pidana ringan di pengadilan. Meskipun demikian, keterbatasan legitimasi formal, resistensi sebagian aparat penegak hukum, serta minimnya infrastruktur digital masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Namun, perlu diperjelas bahwa digitalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini hanya untuk dokumentasi atau pencatatan hasil keputusan adat, bukan untuk melakukan mediasi adat itu sendiri. Oleh karena itu, digitalisasi tidak bertujuan untuk menggantikan proses mediasi adat, yang tetap dilakukan secara konvensional, melainkan hanya untuk mendukung dokumentasi hasil mediasi agar sah dan dapat diterima oleh sistem hukum formal.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembangunan kerangka hukum hybrid yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem hukum pidana positif melalui pemanfaatan teknologi digital. Regulasi yang akomodatif, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta pengembangan infrastruktur hukum digital yang sederhana dan inklusif menjadi langkah strategis agar praktik keadilan restoratif dapat lebih berdaya guna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori hukum pidana berbasis lokalitas dan digitalisasi, tetapi juga implikasi praktis bagi reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M., & Siagian, A. A. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://books.google.co.id/books?id=Luf4EAAAQBAJ>
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Azhari, D., Daharis, A., Abduh, M., Gumilar, A. A., Basri, R., Naya, F., Darwis, M. I., Munir, S., Gani, E. S., Said, Z., & others. (2024). *SOSIOLOGI HUKUM*. Duta Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yYg2EQAAQBAJ>
- Bahri, S. (2024). *Eksistensi Peran Lembaga Majelis Adat Aceh Dalam Penerapan Kearifan Lokal Untuk Penyelesaian Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana (Study Penelitian Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*.
- Djunaedi. (2023). Optimalisasi Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.
- Fikarudin, W., & Ermania, W. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Firmanto, T., Apriyanto, A., Fajrina, R. M., Sepriano, S., & Yunita, N. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=i-w3EQAAQBAJ>
- Imelda, C., Dewi, P. M., Budiman, E. A., Yustrisia, L., Wardana, K. W., Hariri, A., Apriyani, R., Adriani, F., Arman, Z., Indrijantoro, W., & others. (2025). *Transformasi Hukum*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=RplyEQAAQBAJ>

- Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Jonas Salmon, H. C. (2024). Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 99–107. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.497>
- Karjono, A., & Malau, P. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law]. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1035. [https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan%20Keadilan%20Restoratif%20Justice%20Dalam%20Hukum%20Pidana%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- Maryani, I., Sulisworo, D., Kurniasari, E., Hartanto, D., & Widodo, H. (2025). *Ruang Kelas Sebagai Ruang Bebas: Media, Budaya, dan Pemikiran Kritis dalam Pendidikan Abad 21 (sebuah bunga rampai)*. K-Media. <https://books.google.co.id/books?id=STJrEQAAQBAJ>
- Marzuki, M. (2024). Urgensi Dunia Hukum Mengejar Kecepatan Transformasi Siber. *Pancasila Law Review*, 1(1), 33–45.
- Maulida, G. (2025). *Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice : Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. 2(1), 20–28.
- Nooryono, A. Q. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua. *Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Nugroho, F. S. (2023). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.
- Partini, N. N. T. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. *Virtue Jurisprudence*, 2(2), 192–201.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Rasiwan, D. H. I. S. H. M. H. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=-7JWEQAAQBAJ>
- Rizkia, N. D., Nazmi, N., Mulyana, Y., Purba, T. L. D., Jayadi, H., Silalahi, F., Surya, A., & Saragi, P. (n.d.). *BUKU HUKUM ACARA PIDANA*. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=b513EQAAQBAJ>
- Rubi, Maulana, .M. Chandra Restu, Yulrisnanda, M. F., & Saripudin, A. (2021). *Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional*. 5(2012), 861–869. <http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris>
- Sulaiman, Muksalmina, PG, E. G., Mardhatillah, F., Tasyukur, Azzahra, A. P., & Rahmadana. (2024). Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 1210–1218.
- Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta. <https://books.google.co.id/books?id=HYgzEQAAQBAJ>
- Susanti, D. D. O. S. H. M. H., & Efendi, S. H. M. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. bumi aksara pt. <https://books.google.co.id/books?id=eZ6AEAAAQBAJ>

- Tampinongkol, K. R. (2024). KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN PERJA 15 TAHUN 2020. *Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*, 126.
- Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana : Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(02), 33–40.
- Wibowo, A. (2023a). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 192.
- Wibowo, A. (2023b). *Penyelesaian Sengketa Hukum Properti*. Yayasan Prima Agus Teknik.